

**PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

S K R I P S I



NINI ANDRIANI

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2016

**PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

S K R I P S I

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik

**NINI ANDRIANI
1265140007**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

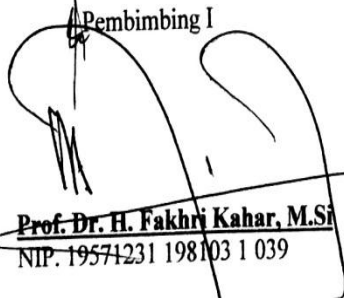
PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan Surat Persetujuan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor: 2846/UN36.6/PI/2016, tanggal 10 Juni 2016 untuk membimbing Saudara:

Nama : Nini Andriani
NIM : 1265140007
Program Studi : Ilmu Administrai Negara
Judul Skripsi : Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan dapat diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Makassar, Agustus 2016

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si
NIP. 19571231 198103 1 039

Pembimbing II

Dr. Muh. Nur Yamin, M.Si
NIP. 19670131 199203 1 001

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan SK Dekan No. 5537/UN36.6/KM/2016 Tanggal 23 September 2016. Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, pada hari Jumat tanggal 30 September 2016.

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar

Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum.
NIP. 19671231 199303 1 016

Panitia Ujian :

1. Ketua : Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum. (.....)
2. Sekretaris : Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si. (.....)
3. Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si. (.....)
4. Pembimbing II : Dr. Muh. Nur Yamin, M.Si. (.....)
5. Penguji I : Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si. (.....)
6. Penguji II : Dr. Risma Niswati, SS, M.Si. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nini Andriani
NIM : 1265140007
Tempat/ Tgl. Lahir : Leworeng, 13 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.

Dengan pembimbing masing-masing:

1. Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si
2. Dr. Muh. Nur Yamin, M.Si

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur ciplakan/plagiat.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya siap dituntut di dalam/luar pengadilan dan menanggung resiko yang diakibatkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab moral untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, September 2016

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si
NIP. 19601231 198803 1 011

Yang membuat pernyataan



Nini Andriani
NIM. 1165140007

MOTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.

(Q.S Ath-Thalaq: 2-3)

*Tetap berpikir positif, ikhlas, sabar
serta selalu bersyukur akan berbuah manis pada akhirnya.*

(Nini Andriani)

Karya ini kupersembahkan kepada Allah SWT

dan Nabi Muhammat SAW

Kepada kedua orang tua dan keluargaku,

Kepada sahabat, teman-teman mahasiswa dan kepada semua

yang memahami ilmu ini dan mengamalkannya

Semoga memberikan berkah Amin

ABSTRAK

NINI ANDRIANI. 2016. Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Fakhri Kahar dan Muh. Nur Yamin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan serta pengujian kesimpulan, dan pengecekan keabsahan temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan Perencanaan dalam penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun masih kurang maksimal meski adanya dasar yang digunakan sebagai penentuan target pajak namun realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun mengalami penurunan sehingga target tiap tahun tidak pernah ditingkatkan. Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dilihat dari pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator pajak tiap Kecamatan, dari segi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu adanya perubahan peraturan yang terjadi pada tahun 2012 menyebabkan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh DPPKAD belum maksimal, karena pemantauan terhadap wajib pajak hanya dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan serta sanksi yang diberikan hanya berupa teguran sehingga mengakibatkan penunggakan pajak sampai bertahun-tahun. Pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan belum optimal, masih perlunya peningkatan di semua bidang, baik perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng” Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau yang mampu mengubah alam jahiliyah menuju kemerdekaan berwacana dan beraktualisasi demi kemajuan dan keselamatan umat dan hanya Beliauulah Uswatun Hasanah yang hak.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas: Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian, Bab II berisikan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, Bab III berisi metode penelitian yang menguraikan jenis dan disain penelitian, fokus dan deskripsi fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, Bab V berisi kesimpulan dan saran.

Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat disusun dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP, Rektor Universitas Negeri Makassar beserta staf atas segala bentuk pelayanannya.
2. Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, atas segala bentuk pelayanannya yang telah memberikan fasilitas di dalam perkuliahan dan persetujuan mengadakan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar atas segala bentuk pelayanannya.
4. Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara sekaligus selaku penguji I yang telah memberikan petunjuk dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si. Selaku Pembimbing I yang dengan segala kesabaran dan ketekunan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis terutama dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis betul-betul merasakan kepedulian beliau dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Muh. Nur Yamin, M.Si. Selaku Pembimbing II yang dengan segala kesabaran dan ketekunan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis terutama dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis betul-betul merasakan kepedulian beliau dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. Risma Niswaty, SS, M.Si. selaku Penguji II yang telah memberikan petunjuk dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.

8. Para dosen dan staf administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial yang telah mendidik penulis selama dalam proses perkuliahan.
9. Sulmiah, S.Pd., M.A.P, Muhammad Nur, S.Pd., M.AP dan Muh. Lutfi Siraj, Spd., M.Pd., atas saran dan bantuan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin penelitian.
11. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng yang telah memberikan izin penelitian.
12. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng terkhusus Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah beserta staf, atas izin dan pemberian datanya.
13. Sahabat sekaligus sepupu tercinta Nurul Pratiwi, Nurjannah dan Asni yang senantiasa menemani dalam proses penyelesaian skripsi.
14. Sahabat sekaligus saudara tercinta Dendi Hardiyanti Sophian, Dian Hafizah Zaitun, Nurhaera Yahya, dan Putri Eka Pratiwi Nugroho serta Boybandcuu yang tetap setia menyemangati dan selalu ada dalam suka maupun duka untuk penulis.
15. Teman-teman KKN di Desa Pandung Batu yang selalu memberikan semangat dan doa selama penulis menyelesaikan skripsi.
16. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2012 yang telah memberikan bantuan selama penulis menyelesaikan skripsi.

17. Agustiawan yang selalu sabar, memberi semangat, doa dan mengorbankan waktu dan tenaga demi kelancaran penulisan skripsi.
18. Saudara serumahku di Makassar Sari Agustiana, H. Ismail, Hairuddin S.SOS, dan Satriadi yang selalu membantu serta memberi motivasi.
19. Terkhusus kepada kedua orang tua tersayang Etta Bakri dan Mama Hj. Norma tercinta, yang telah memberikan kasih sayang yang luar biasa, serta doa, dan dukungan yang tiada henti-hentinya.
20. Terakhir kepada kakek dan nenek tersayang Nurdin dan Hj. A. Sitti Manindar yang telah memberikan kasih sayang yang luar biasa, serta doa, dan dukungan yang tiada henti-hentinya.

Semoga segala bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukannya.

Makassar, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	III
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	IV
MOTO	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR GAMBAR	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka	8
1. Konsep Pengelolaan	9
2. Fungsi Manajemen	8
3. Pendapatan Asli Daerah	13

4. Teori Perpajakan.....	16
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	18
B. Kerangka Konseptual	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	22
C. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22
D. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian	23
E. Jenis dan Sumber Data	24
F. Instrumen Penelitian.....	25
G. Prosedur Pengumpulan Data	26
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	27
I. Analisis Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Penyajian Data Hasil Penelitian	39
1. Perencanaan	40
2. Pelaksanaan	45
3. Pengawasan	51
C. Pembahasan	55
1. Perencanaan	55
2. Pelaksanaan	57
3. Pengawasan	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Implikasi.....	61
C. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Data target dan realisasi Pajak 2010-2015	4
2.	Nama wajib pajak (perusahaan)	43
3.	Nama wajib pajak (individu)	44
4.	Harga standar pengambilan mineral bukan logam dan batuan..	50
5.	Target dan realisasi pajak 2010-2015.....	56
6.	Kontribusi pajak terhadap PAD.....	58

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Skema Kerangka Konseptual.....	20
2.	Model Analisis Interaktif.....	29
3.	Struktur Organisasi.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Matriks Penelitian	66
2.	Pedoman Wawancara	67
3.	Matriks Pedoman Wawancara.....	68
4.	Daftar Nama Informan	69
5.	Matriks Data Hasil Wawancara.....	72
6.	Usulan Judul Skripsi.....	80
7.	Persetujuan Judul dan Calon Pembimbing.....	81
8.	Pengesahan Judul Skripsi dan Pembimbing.....	82
9.	Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian.....	83
10.	Izin Penelitian dari BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan.....	84
11.	Izin Penelitian Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng ..	85
12.	Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	86
13.	Dokumentasi	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan pembangunan akan menimbulkan kemandirian pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemandirian pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat dengan segala kebijakan yang ada. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah harus terus menggali berbagai sumber penerimaan yang nantinya akan digunakan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan dapat dilaksanakan apabila ada dana tersedia. Sumber dana tersebut dapat diperoleh dengan menggali sumber-sumber potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan “Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah”.¹

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Soppeng diantaranya yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bumi bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak sarang burung walet.

Salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi yang penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.3 Tahun

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2012 menjelaskan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Egy Valia (2011) dengan judul Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian Golongan C dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan.² Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Secara umum kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan masih tergolong kecil, ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, dan kurangnya pengawasan dan pembinaan Pemerintahan Kabupaten Solok yang mengakibatkan banyaknya pertambangan ilegal, akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh Indah Rahmawati (2014) dengan judul Analisi Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gresik.³ Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Gresik tahun 2009-2013 berdasarkan target penerimaan rata-rata sangat efektif, sedangkan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan kurang efektif kecuali di tahun 2013 sangat efektif. Dalam penetapan target pajak mineral bukan

² Valia, Egy. 2011. *Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian Golongan C dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan*. Skripsi tidak diterbitkan. Padang: Universitas Andalas

³ Rahmawati, Indah. 2014. *Analisi Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gresik*. Jurnal tidak diterbitkan. Gresik: Universitas Brawijaya Malang

logam dan batuan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) hanya mengacu pada realisasi tahun sebelumnya tidak sesuai dengan potensi yang ada sehingga tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan kurang efektif.

Adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor 3 Tahun 2012 maka sumber pendapatan daerah dari pajak tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adapun data target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2013-2015:

Tabel 1. Data target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Soppeng tahun 2010-2015

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1.	2010	Rp. 310.542.000	Rp. 246.264.522	Tidak mencapai target
2.	2011	Rp. 310.424.061	Rp. 236.618.520	Tidak mencapai target
3.	2012	Rp. 246.264.522	Rp. 8.686.000	Tidak mencapai target
4.	2013	Rp. 40.000.000	Rp. 35.601.125	Tidak mencapai target
5.	2014	Rp. 150.000.000	Rp. 84.078.500	Tidak mencapai target
6.	2015	Rp. 150.000.000	Rp. 146.878.425	Tidak mencapai target

Sumber : Kantor Bidang PAD DPPKAD Kabupaten Soppeng, tahun 2016

Dari data di atas yang diperoleh sejak enam tahun terakhir yang dikelola oleh Kantor Bidang Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa angka realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2010-2011 mengalami penurunan 3,00%, pada tahun 2011-2012 realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan yang sangat drastis yakni 72,7% sedangkan dari tahun 2013-2015

mengalami peningkatan mencapai 74,57%, tetapi tidak pernah mencapai target. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan seringnya pengusaha tambang tidak beroprasi sehingga menyebabkan mereka tidak membayar pajak, serta adanya perubahan peraturan daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2012.

Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan sesuai dengan konsep fungsi manajemen yang dirumuskan oleh Terry. Apabila Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Soppeng dapat dikelola dengan maksimal maka dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun ke tahun merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan cukup menjanjikan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Berdasarkan pemaparan di atas kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang menunjang Pembangunan Daerah, sehingga penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang “ Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan pajak mineral mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng?
3. Bagaimana pengawasan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng?
- B. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan pajak mineral mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng?
- C. Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng?

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis dalam menambah pengetahuan serta menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti sektor pajak mineral bukan logam dan batuan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan referensi bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng untuk lebih mengefektifkan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pengelolaan

Kata Pengelolaan memiliki arti yang sama dengan manajemen, dengan demikian pengelolaan dapat diartikan sebagai sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan suatu pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Ali dan Baharuddin mengemukakan pengertian “pengelolaan mengandung makna penyelenggaraan kegiatan yang secara fungsional dilakukan dan yang berlangsung secara sistematis guna mencapai tujuan secara efektif efisien”.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang.⁵ Siswanto mengemukakan bahwa “manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan”.⁶ Lebih lanjut Mappaenre menyatakan bahwa “manajemen adalah suatu seni dan ilmu tentang cara

⁴ Ali Faried dan Baharuddin. 2014. *Ilmu Administrasi dan Pendekatan Hakikat Inti*. Bandung: Refika Aditama, hal. 91

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengelolaan*. (Online) (<http://kbbi.web.id/pengelolaan>, diakses 29 Desember 2015)

⁶ Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal. 28

mengatur, memimpin, dan mengendalikan semua sumber (*resources*) dalam rangka mencapai hasil atau tujuan tertentu”.⁷

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Fungsi Manajemen

Terry mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen yang terkenal yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang disingkat menjadi (POAC).⁸

a. Perencanaan (*Planning*)

Siagian menyatakan bahwa “Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan”.⁹ Rencana adalah satu keputusan karena rencana merupakan suatu keputusan maka kegunaanya baru akan terlihat setelah dilaksanakan. Lebih lanjut Siswanto mengemukakan bahwa “perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya”.¹⁰

⁷ Mappaenre, Ahmad. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, hal. 14

⁸ Terry dalam Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara

⁹ *Ibid*, hal. 88

¹⁰ Siswanto. *op. cit.* 42

Mappaenre menjelaskan bahwa :

Dalam membuat perencanaan kita harus mengetahui sifat dari perencanaan itu sendiri, yaitu perencanaan harus bersifat :

- 1) *Factual* yang artinya bahwa suatu perencanaan (planning) yang baik harus dibuat berdasarkan fakta-fakta (data-data) yang ada dan dipikirkan pula kejadian-kejadian yang mungkin timbul dalam tindakan pelaksanaannya kelak..
- 2) Bersifat *rational*, yang artinya logis apabila dikatakan bahwa sebelum membuat rencana, sumber-sumber apa yang telah, sedang, dan akan tersedia perlu diketahui dengan tepat. Tidak didasarkan kepada dugaan-dugaan saja.
- 3) *Fleksibel*, artinya suatu perencanaan yang baik dan sempurna harus dapat mengikuti perkembangan kemajuan masyarakat, perubahan situasi dan kondisi dengan tidak disangka-sangka.
- 4) Bersifat *kontinue*, artinya bahwa perencanaan itu harus dibuat dan dipersiapkan untuk tindakan yang terus menerus dan berkelanjutan.
- 5) Bersifat *dialektif*, artinya perencanaan itu dibuat dengan memikirkan selalu peningkatan dan perbaikan-perbaikan untuk kesempurnaan masa yang akan datang.¹¹

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian sebagai fungsi organik administrasi dan manajemen ditempatkan sebagai fungsi kedua setelah fungsi perencanaan.

¹¹ Mappaenre. *op. cit.* 90

Siagian memberikan definisi bahwa:

Pengorganisasian ialah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.¹²

Proses pengorganisasian menurut Sidikprawiro dijabarkan menurut konsekuensinya sebagai berikut:

- 1) Perumusan tujuan
- 2) Penetapan tugas pokok
- 3) Perincian kegiatan
- 4) Pengelompokan kegiatan-kegiatan ke dalam fungsi-fungsi
- 5) Departementasi
- 6) Pelimpahan wewenang
- 7) *Staffing*
- 8) *Fasilitating*.¹³

c. Penggerakan (*Actuating*)

Mappaenre memberikan definisi bahwa: “*actuating* adalah aktivitas untuk mendorong dan menjuruskan semua bawahan agar berkeinginan, bertujuan serta bergerak untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai”.¹⁴ Karena sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting dan sangat menentukan dalam hubungan perburuhan maka hal-hal yang berhubungan dengan konsepsi motivasi sudah wajar diberi perhatian yang sungguh-sungguh dari setiap pelaku yang berkepentingan untuk keberhasilan organisasi sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Siagian mengemukakan penggerakan adalah keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya

¹² Siagian. *op. cit.* 95

¹³ Sidikprawiro dalam Mappaenre. *op. cit.* 95

¹⁴ Mappaenre. *op. cit.* 99

tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.¹⁵

Fungsi *actuating* merupakan fungsi yang sangat penting karena memegang peranan yang vital dalam proses manajemen. Berbeda halnya dengan fungsi manajemen lainnya, maka fungsi *actuating* ini senantiasa berhubungan dengan manusia. Sukses tidaknya seseorang pemimpin sangat bergantung pada cara menggerakkan orang-orang bawahan. Salah satu cara menggerakkan bawahan ialah pemberian perintah. Manullang menyatakan bahwa perintah itu mengandung empat unsur, yaitu (a) intruksi resmi, (b) dari atasan kepada bawahan, (c) mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu hal, dan (d) merealisasi tujuan perusahaan.¹⁶

d. Pengawasan (*controlling*)

Manullang menjelaskan bahwa:

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula.¹⁷

Siagian memberikan pengertian pengawasan sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸

¹⁵ Siagian. *op. cit.* 106

¹⁶ Manullang dalam Mappaenre. *op. cit.* 100

¹⁷ Manullang, M. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen (Cetakan Ke-21)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 12

¹⁸ Siagian. *op. cit.* 112

Siagian menyatakan bahwa :

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu:

- 1) Pengawasan langsung (*direct control*)
Yang dimaksud pengawasan langsung ialah apabila pemimpin organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya.
- 2) Pengawasan tidak langsung (*indirect control*)
Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh.¹⁹

3. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo:

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.²⁰

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.²¹

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan asli yang berasal dari potensi daerah. Supaya Pemerintah Daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu

¹⁹ *Ibid*, hal. 115

²⁰ Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, hal. 132

²¹ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.²²

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah adalah ;

- 1) Pajak daerah berasal dari Pajak Negara yang dipisahkan oleh daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan pajak daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku lainnya.

b. Retribusi Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu ;

²² Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 tentang Pemerintah Daerah.

- 1) Retribusi Jasa Umum, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan.
- 2) Retribusi jasa Usaha, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan misalnya : retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong hewan dan lain-lain.
- 3) Retribusi Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

4. Teori Perpajakan

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kon tra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 menyebutkan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²³

Soemitro mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²⁴

Siahaan menjelaskan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.²⁵

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Propinsi dan pajak daerah tingkat Kab/kota. Penggolongan pajak seperti di atas diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009, pajak tersebut antara lain:

- a. Pajak Provinsi terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

²³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

²⁴ Soemitro dalam Mardiasmo 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, hal. 1

²⁵ Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 7

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran; dan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.²⁶

Pajak dilihat dari fungsinya menurut Mardiasmo mempunyai dua fungsi yakni:

- 1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.²⁷

5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30, Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

²⁶ Undang-undang No. 28 tahun 2009. *op. cit.* 11

²⁷ Mardiasmo 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi. *loc. cit.*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 tentang pajak daerah yang menjadi Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

1) Asbes, 2) Batu Tulis, 3) Batu setengah permata, 4) Batu kapur, 5) Batu apung, 6) Batu permata, 7) Bentonit, 8) Dolomit, 9) Feldspar, 10) Garam batu (halite), 11) Grafit, 12) Granit/ Andesit, 13) Gips, 14) Kalsit, 15) Kaolin, 16) Leusit, 17) Magnesit, 18) Mika, 19) Marmer, 20) Nitrat, 21) Opsidien, 22) Oker, 23) Pasir dan kerikil, 24) Pasir kuarsa, 25) Perlit, 26) Phospat, 27) Talk, 28) Tanah serap (fullers earth), 29) Tanah diatome, 30) Tanah liat, 31) Tawas (alum), 32) Tras, 33) Yarosif, 34) Zeolit, 35) Basal, 36) Trakkit, 37) Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

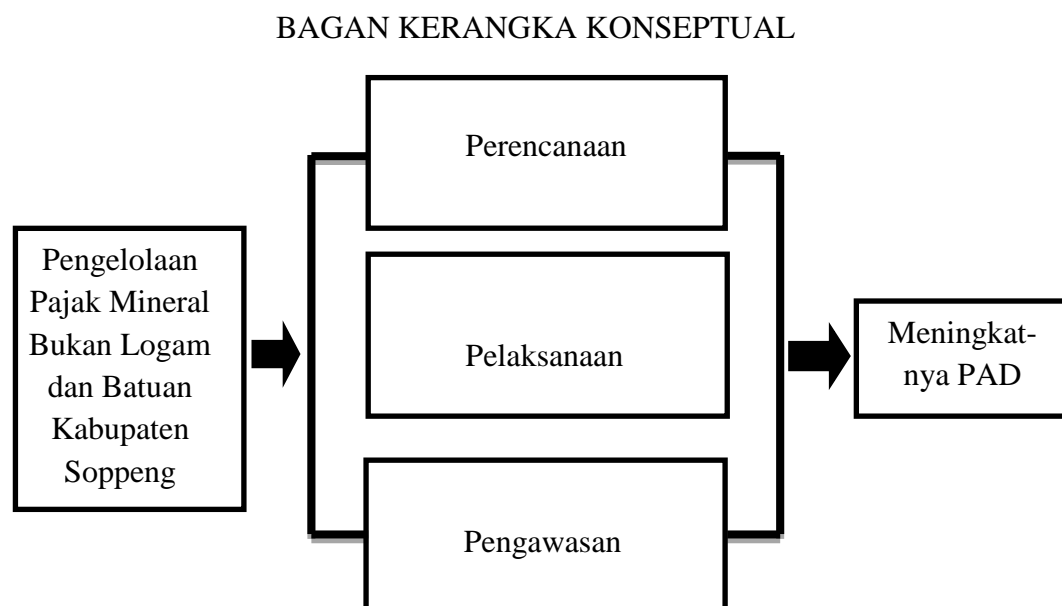
Dari beberapa jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan hanya terdapat tujuh jenis yang dikelola oleh Kabupaten Soppeng yaitu: batu gunung, batu pecah, batu kali, tanah/timbunan, pasir, kerikil dan batu kapur.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar (25%) dua puluh lima persen sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 31 tentang Pajak Daerah. Hal ini agar pemerintah kabupaten/kota dengan leluasa dapat menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen.

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

B. Kerangka Konsep

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut kemampuan daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahannya. Pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan cara menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Akan tetapi penerimaan dari sektor Pajak ini belum maksimal. Hal itu dapat dilihat dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak pernah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum maksimal. Untuk mengetahui pengelolaan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan di bawah ini



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati suatu obyek.

Pendekatan tersebut dipilih dalam penelitian ini karena sesuai untuk digunakan dalam meneliti mengenai pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng, dimana penelitian ini dilaksanakan sesuai karakteristik yang ada yaitu secara langsung terlibat di lokasi penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. Hidayat mengemukakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah cara

melakukan penelitian, dan ini ditentukan oleh paradigma penelitian yang dipilih”.²⁹

Tipe deskriptif dipilih karena sangat sesuai dengan penelitian mengenai pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, di mana penelitian ini memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan teori, selanjutnya menarik kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian sesuai dengan judul penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng.

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian yaitu:

a. Pengelolaan perencanaan pajak mineral bukan logam dan batuan

Mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dalam hal ini DPPKAD Kabupaten Soppeng membuat suatu perencanaan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian target pajak mineral bukan logam dan batuan.

²⁹ Hidayat dalam Fuad Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 53

b. Pengelolaan pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan

Kegiatan mengaplikasikan target yang telah ditetapkan melalui pemungutan pajak daerah yang terdiri dari kegiatan pembagian tugas, serta pemungutan pajak.

c. Pengelolaan pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan

Pengamatan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Di mana DPPKAD Kabupaten Soppeng melakukan pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung.

D. Tahap-tahap Kegiatan Penelitian

Berikut ini merupakan tahap-tahap kegiatan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Tahap persiapan penelitian, peneliti melakukan observasi di DPPKAD Kabupaten Soppeng secara intensif pada sasaran penelitian kemudian mencari data pendukung mengenai apa yang hendak diteliti. Selanjutnya peneliti mulai mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah penelitian dengan membuat pedoman wawancara.
2. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini penelitian dimulai dengan pengajuan surat izin penelitian. Selanjutnya melakukan penelitian di DPPKAD Kabupaten Soppeng dengan melakukan pengumpulan data baik wawancara mendalam maupun observasi partisipasi. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul sesuai dengan pedoman wawancara, merevisi hasil observasi di lapangan.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat ataupun tindakan-tindakan dari informan yang merupakan data primer dan tulisan-tulisan atau gambar/dokumentasi yang mendukung pernyataan informan. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data ini diperlukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni sumber data, dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan yang berkaitan dengan fokus pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng.

Pada penelitian kualitatif, pemilihan informan dengan maksud tidak selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang penting informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian.

Bungin mengemukakan bahwa untuk memperbesar informan, peneliti dapat menggunakan prosedur bola salju (*snowball*) juga dikenal sebagai prosedur “rantai rujukan” atau juga prosedur *networking*, ada beberapa model *snowball* yang dapat digunakan di dalam penelitian sebagai berikut:

- a. *Linear Snowball Modle*, memungkinkan peneliti bergerak linier untuk menemukan informan baru, dari satu informan ke informan lain, dan membentuk bola salju yang besar secara linier

- b. *Exponential Non-Discriminative Modle*, yakni model komposit tanpa diskriminasi terhadap informan. Artinya, semua informan yang dirujuk oleh informan sebelumnya diambil sebagai informan, sehingga perkembangan komposit menjadi akar rumput yang besar dan biasanya berimbang dan subur.
- c. *Exponential Discriminative Snowball Modle*, yakni model selektif yang dikembangkan oleh peneliti di lapangan.³⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah
- 2) Kepala Seksi Pajak Daerah
- 3) Kepala UPTD Pajak sebanyak satu orang
- 4) Kordinator pajak sebanyak dua orang
- 5) Wajib pajak sebanyak dua orang

2. Data sekunder

Data sekunder yang bersumber dari hasil olahan instansi atau sesuatu lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan hal penting dalam melakukan penelitian kualitatif.

Sujarweni mengemukakan bahwa:

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya

³⁰ Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 108

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.³¹

Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengumpul data dengan menggunakan pedoman wawancara dan menjadi pengamat penuh dalam proses penelitian. Status penulis pun diketahui sebagai peneliti oleh objek dan informan di tempat penelitian.

G. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Interview/Wawancara

Penggunaan metode ini dengan pertimbangan untuk memperoleh keterangan sesuai tujuan penelitian, bahwa yang diperoleh melalui wawancara dari sejumlah informan adalah yang akan bermanfaat guna mewujudkan validitas data secara keseluruhan dari responden dengan informasi yang diberikan. Peneliti dalam hal ini akan melakukan tanya jawab kepada informan yang mengetahui seluk beluk fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melakukan tatap muka dengan para informan.

2. Observasi (Pengamatan)

Merupakan cara mengumpulkan data yang berdasarkan pada pengamatan dan tinjauan peneliti secara langsung. Observasi juga merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap para pegawai dalam melaksanakan tugasnya di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

³¹ Sujarweni, Wiratna V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal. 76

Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng serta dalam proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Dokumentasi diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian sebagai bukti nyata telah dilakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa dokumen-dokumen, serta foto yang diambil dalam pelaksanaan penelitian.

H. Pengecekan Keabsahan Temuan

1. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan berbagai waktu. Triangulasi dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain tetapi dengan teknik sama.

Data yang diperoleh melalui wawancara, melalui informan yang ada selanjutnya dilihat kesesuaian informan yang diberikan. Informan yang dianggap sama dan relevan dari para informan akan dipilih dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian ditarik kesimpulannya.

2. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada sumber datanya, tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh sumber data maka data tersebut *valid*. *Member Check*

dilakukan setelah pengumpulan data selesai atau setelah memperoleh kesimpulan.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif yang disampaikan oleh Hubberman dan Miles yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).³²

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan memperbaharui data-data kasar yang ada pada catatan-catatan yang dihasilkan selama meneliti di lapangan sehingga dapat ditentukan informasi yang dianggap sesuai dengan masalah penelitian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

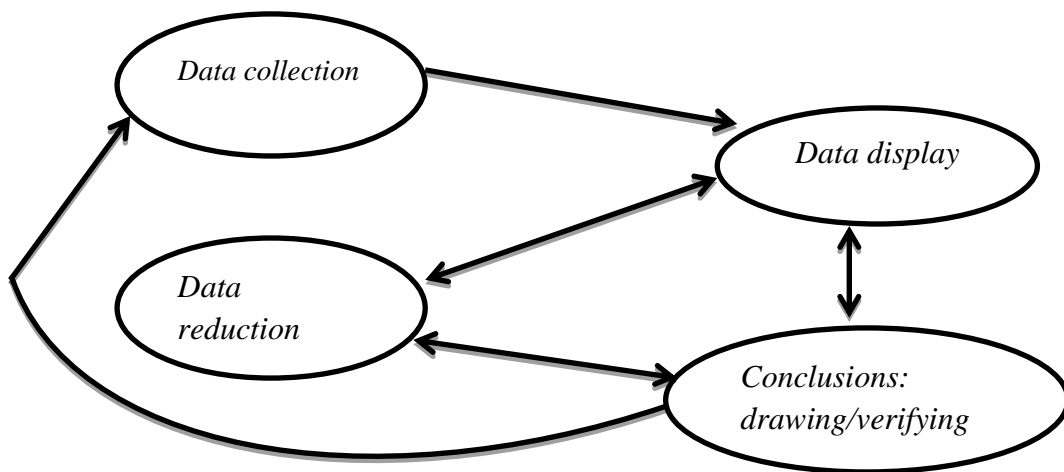
2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah diperoleh dari reduksi data disajikan dalam bentuk sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan mudah dipahami. Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk teks paragraf. Pada tahap ini data yang relevan dengan masalah penelitian disusun sehingga dapat menjadi informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

³² Hubberman dan Milles dalam Fuad dan Kandung. *op. cit.* 63

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclutions*)

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada data-data yang diperoleh selama penelitian sehingga data-data diuji validitasnya. Sehingga kebenaran kesimpulan dapat teruji kebenarannya.



Gambar 2. Model Analisis Interaktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Kondisi Geografis Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng adalah salah satu wilayah yang mempunyai peranan cukup penting dalam pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, Kondisi alam yang potensial terutama untuk lahan pertanian serta letak geografis yang sangat strategis menjadi pendukung utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Soppeng.

Adapun letak astronomis Kabupaten Soppeng adalah terletak antara $4^{\circ} 06' \text{ LS}$ dan $4^{\circ} 32' \text{ LS}$ $119^{\circ} 42' 18'' \text{ BT}$ dan $120^{\circ} 06' 13'' \text{ BT}$ dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan waktu tempuh sekitar empat jam menggunakan alat transportasi darat. Luas wilayah 1.500 km² yang terdiri dari daratan dan perbukitan. Luas daratan $\pm 700 \text{ Km}^2$ berada pada ketinggian rata-rata ± 60 meter di atas permukaan laut. Perbukitan yang luasnya $\pm 800 \text{ Km}^2$ berada pada ketinggian rata-rata ± 200 meter di atas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada pada ketinggian ± 120 meter di atas permukaan laut. Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran $\pm 24^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $\pm 30^{\circ}\text{C}$ dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan komposisi penggunaan lahan, 25.991 Ha atau sekitar 17,33 persen dimanfaatkan untuk areal

persawahan, 28.003 Ha (17,34%) untuk tegalan dan kebun, 29.733 Ha (19,82%) merupakan hutan negara, 24.042 Ha (16,03%) merupakan hutan rakyat, dan selebihnya digunakan untuk lahan perkebunan, ladang, perumahan, jalanan, dan sebagainya.

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak memiliki wilayah laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah utara.
- b. Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone di sebelah timur.
- c. Kabupaten Bone di sebelah selatan.
- d. Kabupaten Barru di sebelah barat.

2. Kondisi demografis

Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2011 tercatat sebanyak 223.826 jiwa yang terdiri dari laki-laki 105.436 jiwa dan perempuan 118.390 jiwa. Penduduk tersebut tersebar diseluruh desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Soppeng dengan kepadatan 149 jiwa/km². Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Liliriaja yaitu sekitar 280 jiwa/km² dan yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan Marioriawa sekitar 87 jiwa/km².

Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode 2007-2011 terdapat penurunan jumlah penduduk sebesar 1.54 %. Pada tahun 2007 berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Soppeng jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 227.273 jiwa Penduduk Kabupaten Soppeng yang terdiri dari laki-laki 106.923 jiwa dan

perempuan 120.350 jiwa. Penurunan tersebut disebabkan disamping berhasilnya program pemerintah dalam menekan angka kelahiran juga disebabkan oleh semakin meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng yang mengakibatkan terjadinya perpindahan penduduk dalam pencarian lapangan pekerjaan di daerah lain.

3. Pajak Daerah Kabupaten Soppeng

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Soppeng terdiri dari 10 jenis pajak daerah yaitu:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Dari 37 jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terdapat di

Kabupaten Soppeng hanya ada 7 jenis yang terdiri dari: batu gunung, batu pecah, batu kali, tanah/timbunan, pasir, kerikil dan batu kapur. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak pada mineral bukan logam dan batuan lainnya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah salah satu perangkat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris daerah Kabupaten. Adapun tugas pokok, fungsi dan tata kerja DPPKAD berdasarkan Perda Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng.

a. Visi dan Misi

1. Visi

“Tercapainya Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng yang terukur dan rasional.”

2. Misi

- a) Meningkatkan pendapatan serta efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

d) Meningkatkan kesadaran masyarakat.

b. Tugas dan Fungsi Unit Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Kabupaten Soppeng terdiri atas :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai fungsi;

- a) Perumusan kebijakan teknis dinas
- b) Penyusunan rencana stratejik dinas
- c) Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas.
- e) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas kepala dinas antara lain :

- a) Merumuskan, mengarahkan dan menyelenggarakan rencana stratejik program kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah.
- b) Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Mengkoordinasikan penyusun dan pedoman pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, mengkoordinasikan penyusunan

- d) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), rancangan perubahan APBD dan sisa perhitungan APBD serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
- e) Mengarahkan, merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f) Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga.
- b) Penyelenggaraan administrasi umum.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
- d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Rincian tugas sekretariat antara lain :

- a) Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.
- b) Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas.

- d) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- e) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan.

3. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bidang PAD mempunyai fungsi yaitu :

- a) Penyusunan kebijakan teknis bidang
- b) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang PAD mempunyai tugas yaitu :

- a) Merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengkoordinasian potensi PAD.
- d) Memberikan petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi dan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan

funksinya.

- e) Menyelenggarakan kebijakan pengelolaan pajak, retribusi daerah, pembinaan dan pengawasan, evaluasi pajak dan retribusi serta pungutan lainnya yang sah.

4. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai fungsi antara lain ;

- a) Penyusun kebijakan teknis bidang.
- b) Penyelenggraan program dan kegiatan bidang.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bidang anggaran mempunyai tugas antara lain:

- a) Merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- c) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan anggaran.
- d) Melaksanakan pengkajian kebijakan pengaplikasian anggaran daerah dan penyusunan APBD.

5. Bidang akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai fungsi antara lain :

- a) Penyusunan teknis bidang
- b) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
- c) Pembinaan, pengoordinasian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang akuntansi mempunyai tugas antara lain;

- a) Merencanakan kegiatan dan program sesuai dengan tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- c) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan target yang ditentukan.
- d) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang aset

Bidang aset mempunyai fungsi antara lain :

- a) Penyusunan teknis bidang
- b) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang

- c) Pembinaan, pengoordinasian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang aset mempunyai tugas antara lain :

- a) Merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- c) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan aset.
- d) Mengordinir inventarisasi aset daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

B. PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

Pembahasan penelitian ini akan menjelaskan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan. Penyajian data hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung antara penulis dengan beberapa informan dan data-data lain yang dapat mendukung penelitian ini.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat menentukan pengelolaan pajak daerah. Kegiatan perencanaan sangat berpengaruh terhadap kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Oleh karena itu proses perencanaan harus dipersiapkan secara sistematis karena berhasil atau tidaknya suatu kegiatan tergantung pada proses perencanaannya.

Kegiatan perencanaan yang dimaksud dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan perumusan strategi untuk menentukan besarnya target yang ingin dicapai dan dasar yang digunakan dalam penentuan target tiap tahun.

a. Penentuan Target

Perencanaan merupakan tahap pertama dalam manajemen yang memiliki peran penting dalam menentukan besarnya target yang ingin dicapai untuk satu tahun anggaran. Tujuan dari penentuan target tiap tahun adalah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan DPPKAD Kabupaten Soppeng sangat memperhatikan besaran pajak yang masuk dari beroprasinya semua wajib pajak.

Pendapat informan mengenai penentuan target tiap tahun diperoleh dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Indri Purnama Sari S.STP selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah di DPPKAD Kabupaten Soppeng:

“Terkait perencanaan DPPKAD mengadakan pertemuan dengan dinas-dinas terkait untuk menentukan target tahun berikutnya dan besarnya

penentuan target masih berdasarkan dari realisasi tahun sebelumnya, apabila besaran pajak yang masuk mencapai target maka tahun berikutnya akan dinaikkan begitupun sebaliknya karena realisasi mempengaruhi pendapatan Kabupaten” (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.³³

Hal yang serupa diungkapkan oleh Bapak Drs. Nur Alam selaku Kepala Seksi Pajak Daerah yaitu: “Penetapan target sangat dipengaruhi oleh perencanaan karena besarnya pajak sulit untuk diprediksi, sehingga penetapan target tahun berikutnya dilihat dari tahun sebelumnya (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.³⁴

Perencanaan dalam penentuan target tiap tahun yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Soppeng berdasarkan keterangan informan yaitu mengadakan pertemuan dengan dinas-dinas yang terkait dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk melihat banyaknya jumlah penambang serta hasil yang diperoleh dari masing-masing tambang untuk satu tahun berjalan. Hal ini dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Soppeng untuk mempermudah dalam penentuan target pajak untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap penentuan target dapat disimpulkan bahwa perencanaan sangat berpengaruh terhadap strategi untuk menentukan besarnya target yang ingin dicapai DPPKAD Kabupaten Soppeng yaitu mengacu pada besaran pajak yang masuk dari tahun sebelumnya sehingga sangat berpengaruh untuk penentuan target pada tahun selanjutnya. Ini berdasarkan hasil observasi pada hari Kamis, 23 Juni 2016.

³³ Wawancara dengan Indri Purnama Sari S.STP tanggal 23 Juni 2016.

³⁴ Wawancara dengan Drs. Nur Alam tanggal 23 Juni 2016.

b. Dasar penentuan target

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Nur Alam selaku Kepala Seksi Pajak Daerah yaitu:” Dasar penentuan target tiap pajak daerah meliputi realisasi, penambahan atau pengurangan wajib pajak serta besarnya potensi penambang (wawamcara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.³⁵

Adapun indikator-indikator yang dijadikan sebagai dasar penentuan target terdiri dari:

1) Realisasi

Realisasi sangat berpengaruh terhadap penentuan target karena merupakan wujud nyata dari besaran pajak daerah yang masuk setiap tahunnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah DPPKAD Ibu Indri Purnama Sari S.STP pada tanggal 23 juni 2016 mengatakan bahwa: “Dasar penentuan target dilihat dari realisasi tahun sebelumnya apabila target tidak tercapai maka target akan diturunkan 10% begitupun sebaliknya”.³⁶

2) Penambahan atau pengurangan wajib pajak

Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah DPPKAD Ibu Indri Purnama Sari S.STP mengatakan bahwa: “Apabila wajib pajak bertambah maka akan dilakukan penambahan

³⁵ *Ibid*

³⁶ Indri Purnama Sari S.STP, *loc. cit.*

dalam hal penentuan target, begitupun sebaliknya apabila wajib pajak berkurang maka akan dilakukan penurunan dalam penentuan target (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)".³⁷

3) Besarnya potensi penambang

Potensi mineral bukan logam dan batuan merupakan kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, jumlah potensi bahan mineral bukan logam dan batuan sangat berpengaruh terhadap target penerimaan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah DPPKAD Ibu Indri Purnama Sari S.STP menjelaskan bahwa:

"Potensi dapat dilihat dari banyaknya objek hasil bumi yang diperoleh apabila hasil bumi yang diperoleh berlimpah maka target akan dinaikkan, kondisi alam juga sangat berpengaruh terhadap jumlah tambang yang diperoleh (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)".³⁸

Tabel 2. Nama Wajib Pajak (perusahaan)

NO	WAJIB PAJAK	KECAMATAN
1.	Sinar Matra	Lalabata
2.	PT. Lompulle	Lalabata
3.	PT. Migs	Lalabata
4.	PT. Hasten Perkasa	Lalabata
5.	PT. Olga Anugrah p	Lalabata
6.	PT. Bawakaraeng	Marioriwawo

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

Tabel 3. Nama Wajib Pajak (individu)

NO	WAJIB PAJAK	KECAMATAN
1.	Ramlansyah	Lilirilau
2.	H. Samsuddin Denu	Lilirilau
3.	H.A. Muh. Taufik	Lilirilau
4.	H. Laenre	Lilirilau
5.	Muh. Nurhidayat	Lilirilau
6.	Jumardin	Lilirilau
7.	Hj. Nuryajinoji	Lilirilau
8.	Hj. Bungaria	Lilirilau
9.	Sahabu/Anton	Lalabata
10.	Muhajirin	Lalabata
11.	H. Muh. Arif	Lalabata
12.	Umar/Hj. Dalle	Lalabata
13.	H. Arsyad	Lalabata
14.	Drs. H. Asis	Lalabata
15.	A. Ngewa	Marioriwawo
16.	A. Yusuf Bombang	Marioriwawo
17.	Nurdin	Marioriwawo
18.	H. Sau	Marioriwawo
19.	A. Samsu Rijal	Ganra
20.	H. Muh. Arif	Ganra
21.	Muh . Ilyas	Liliriaja
22.	H. Tajuddin	Liliriaja
23.	Asriadi	Citta
24.	H. A. Mahmud Magga	Donri-Donri

Sumber: Kantor PAD DPPKAD Kabupaten Soppeng, tahun 2016

Dasar yang digunakan dalam penentuan target berdasarkan keterangan informan bahwa dasar-dasar yang digunakan yaitu realisasi, penambahan atau pengurangan wajib pajak serta besarnya potensi penambang. Apabila ketiga dasar tersebut tidak terlaksana dengan baik maka target pajak mineral bukan logam dan tidak ditingkatkan karena mempunyai peran yang sangat penting sebagai dasar dari penentuan target pajak untuk tahun berikutnya

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap dasar-dasar yang digunakan dalam penentuan target pajak daerah tiap tahunnya dapat disimpulkan bahwa meski ada dasar yang digunakan DPPKAD Kabupaten

Soppeng dalam menentukan target tahun berikutnya namun realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tidak pernah mencapai target sehingga target untuk tahun berikutnya tidak pernah ditingkatkan. Ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan pada hari Kamis, 23 Juni 2016.

2. Pelaksanaan

Setelah kegiatan perencanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan maka kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan terdiri dari kegiatan pembagian kerja serta proses pemungutan pajak.

a) Pembagian kerja

Dalam melakukan suatu pekerjaan perlu dilakukan pemisahan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap individu, begitup dalam hal pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan pembagian kerja sangat diperlukan agar memudahkan pekerjaan serta tidak terjadi bentrok kerja.

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Indri Purnama Sari S.STP selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah DPPKAD Kabupaten Soppeng menyatakan bahwa:

”Pembagian kerja di DPPKAD dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan ada yang disebut dengan UPTD yang bertugas menunjuk kordinator yang menangani berbagai jenis pajak termasuk pajak mineral bukan logam dan batuan”(wawancara pada hari Kamis, 24 Juni 2016)”.³⁹

Hal serupa dinyatakan oleh Bapak Drs.Nur Alam selaku Kepala Seksi Pajak Daerah yaitu:”Setiap Kecamatan memiliki UPTD dan kordinator yang

³⁹ *Ibid.*

menangani pajak (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.⁴⁰ Bapak Lukman,SE menambahkan selaku kepala UPTD Kecamatan Lalabata yaitu:” Di UPTD ada yang bertanggung jawab sebagai kordinator penagih pajak kepada penambang ”(wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.⁴¹

Bapak Muhtar S.SOS selaku kordinator pajak mineral bukan logam dan batuan kecamatan Lalabata menjelaskan bahwa:” Sebagai kordinator saya bertanggung jawab terhadap penagihan serta pengawasan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan”(wawancara pada hari Jumat, 24 Juni 2016)”.⁴² Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Asmi selaku kordinator pajak Kecamatan Ganra yakni:” Sebagai koordinator pajak Kecamatan Ganra saya bertanggung jawab penuh terhadap berbagai jenis pajak termasuk pajak mineral bukan logam dan batuan (wawancara pada hari Jumat, 24 Juni 2016)”.⁴³

Pembagian kerja di DPPKAD Kabupaten Soppeng dalam hal pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu terdiri dari UPTD yang ada di setiap Kecamatan , di sana terdapat koordinator yang bertugas mengani berbagai jenis pajak termasuk pajak minerl bukan logam dan batuan.

Pada realisasinya pembagian kerja ini terkendala oleh jumlah sumber daya manusia yang bertugas menangani pajak, di mana setiap koordinator pajak bukan hanya mengurus pajak mineral bukan logam dan batuan, namun mereka juga mempunyai tugas lain yaitu menangani lebih dari satu jenis

⁴⁰ Drs.Nur Alam, *loc. cit.*

⁴¹ Wawancara dengan Lukman,SE, tanggal 23 Juni 2016.

⁴² Wawancara dengan Muhtar S.SOS, tanggal 24 Juni 2016.

⁴³ Wawancara dengan Asmi, tanggal 24 Juni 2016.

pajak seperti pajak restoran, pajak bumi bangunan, pajak hotel dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator tiap Kecamatan yang mengurus berbagai jenis pajak bukan hanya pajak mineral bukan logam dan batuan . Ini berdasarkan haasil observasi yang dilakukan pada hari Kamis dan Jumat, 23-24 Juni 2016.

b) Pemungutan pajak

Sebelum terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 ada yang dinamakan masa peralihan dimana pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan kepada konsumen yang menggunakan bahan tambang tersebut dan bukan kepada produsen yang melakukan penggalan mineral bukan logam dan batuan.

Pendapat informan mengenai pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di DPPKAD yang diungkapkan oleh Ibu Indri Purnama Sari S.STP selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng:

”Sistem Pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan *Self Assessment* yaitu wajib pajak sendiri yang melakukan pengisian SKAP kemudian menyetorkannya ke kas daerah, sebelum Perda yang baru diterbitkan yang menjadi wajib pajak yaitu pengguna dari mineral bukan logam tersebut bukan penambang hal ini sangat berpengaruh terhadap pemasukan daerah (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.⁴⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Lukman, SE selaku Kepala UPTD Kecamatan Lalabata yaitu:

⁴⁴ Indri Purnama Sari S.STP, *loc. cit.*

”Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem *Self Assessment* dimana penentuan pajak ditentukan oleh penambang sendiri yang diberikan kewenangan penuh kepada penambang untuk menentukan besaran pajak yang dibayarkan kepada Pemda (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.⁴⁵

Hal serupa ditambahkan oleh Bapak Drs. Nur Alam selaku Kepala Seksi Pajak Daerah di DPPKAD kabupaten Soppeng yaitu: ”Proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan cara melakukan penagihan, penyetoran kemudian pelaporan (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.⁴⁶ Bapak Muhtar S.SOS juga menjelaskan yaitu: ”Penagihan SKAP pada wajib pajak dilakukan pada saat akhir bulan, selanjutnya besaran pajak dihitung, setelah itu wajib pajak melakukan pembayaran dan slip setoran dibawa ke bendahara (wawancara pada hari Jumat, 24 Juni 2016)”.⁴⁷ Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Asmi yaitu: “Sebagai kordinator yang bertugas sebagai penagih pajak, penagihan SKAP dilakukan pada akhir bulan (wawancara pada hari Jumat, 24 Juni 2016)”.⁴⁸

Untuk proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

1) Penagihan

Penagihan dilakukan setiap bulan terdiri dari:

- a. Pendataan, pendaftaran dan pelaporan objek pajak
- b. Pengisian Surat Keterangan Asal Produksi (SKAP) oleh

⁴⁵ Lukman, SE, *loc. cit.*

⁴⁶ Drs.Nur Alam, *loc. cit.*

⁴⁷ Muhtar S.SOS, *loc. cit.*

⁴⁸ Asmi, *loc. cit.*

penambang.

- c. Melaporkan besarnya omset/produksi tambang
- d. Petugas tambang menghitung besaran pajak
- e. Pengisian dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- f. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dikelurkan dan diserahkan kepada penambang yang menjadi bukti penetapan jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak
- g. Wajib pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- h. Wajib pajak membayar dengan SSPD

2) Penyetoran

- a. Wajib pajak menyetor ke rekening penerimaan DPPKAD dengan mengisi slip setoran
- b. Setelah pembayaran dilakukan slip setoran diterima wajib pajak kemudian diserahkan kepada kordinator DPPKAD sebagai arsip dan bukti pembayaran.

3) Pelaporan

- a. DPPKAD membuat laporan Realisasi

Berikut ini tata cara perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan, berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2012

Tabel 4. Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Daerah

No	Jenis Bahan Galian	Harga Satuan (M ³)	Tarif (Rp)
1.	Batu gunung		
	a. Utuh	Rp. 11.000	Rp. 2.750/m ³
	b. Pecah	Rp. 10.000	Rp. 2.500/m ³
2.	Batu pecah		
	a. 7-10 cm	Rp. 20.000	Rp. 5.000/m ³
	b. 5-7 cm	Rp. 20.000	Rp. 5.000/m ³
	c. 3-5 cm	Rp. 22.000	Rp. 5.500/m ³
	d. 2-3 cm	Rp. 23.000	Rp. 5.750/m ³
	e. 1-2 cm	Rp. 25.000	Rp. 6.250/m ³
	f. 0,5-1 cm	Rp. 27.000	Rp. 6.750/m ³
3.	Batu Kali		
	a. Utuh	Rp. 13.000	Rp. 3.250/m ³
	b. Belah	Rp. 15.000	Rp. 3.750/m ³
	c. Tempel	Rp. 17.000	Rp. 4.250/m ³
4.	Tanah/ Timbunan		
	a. Uruq/timbunan	Rp. 7.000	Rp. 1.750/m ³
	b. Tanah liat untuk bahan bangunan	Rp. 8.000	Rp. 2.000/m ³
	c. Batu merah		Rp. 5/biji
5.	Pasir		
	a. Timbunan/uruq	Rp. 11.000	Rp. 2.750/m ³
	b. Pasangan	Rp. 9.000	Rp. 2.250/m ³
	c. Beton	Rp. 10.000	Rp. 2.500/m ³
6.	Kerikil		
	a. Sirtu	Rp. 10.000	Rp. 2.500/m ³
	b. Untuk bahan bangunan	Rp. 12.000	Rp. 3.000/m ³
7.	Batu kapur		
	a. Bahan bangunan	Rp. 10.000	Rp. 2.500/m ³
	b. Bahan pupuk		

Sumber: Kantor Bidang PAD DPPKAD Kabupaten Soppeng, tahun 2016

Perubahan peraturan mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan keterangan informan yang terdapat di DPPKAD Kabupaten Soppeng pernah terjadi. Perubahan yang terjadi yaitu sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan atau yang menjadi wajib pajak dilakukan kepada proyek-proyek atau konsumen yang menggunakan bahan tambang tersebut bukan yang melakukan penggalian tambang. Hal ini menyebabkan terjadinya penunggakan pembayaran pajak oleh penambang karena belum menyesuaikan diri terhadap peraturan daerah yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap proses pemungutan pajak dapat disimpulkan bahwa perubahan peraturan sangat berpengaruh terhadap kontribusi pajak yang masuk ke kas daerah. Ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada hari Kamis 23 Juni 2016.

3. Pengawasan

a. Proses pengawasan

Pengawasan merupakan pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi dan memiliki hubungan yang sangat erat antara perencanaan. Pengawasan mempunyai peran penting dalam perencanaan agar tidak terjadi kemungkinan timbulnya penyimpangan. Pengawasan harus dilakukan dengan seefektif mungkin karena dengan pelaksanaan pengawasan yang baik maka akan memberikan sumbangan yang besar pula dalam meningkatkan efisiensi.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Soppeng

terhadap pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan terdiri dari pengawasan langsung dan tidak langsung

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Indri Purnama Sari S.STP menyatakan:” Pengawasan dilakukan dengan pemantauan langsung oleh kordinator pajak yang bertugas untuk mendatangi wajib pajak apabila melakukan operasi pertambangan (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.⁴⁹ Bapak Nur Alam juga berpendapat bahwa:”pengawasan hanya dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.⁵⁰ Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Lukman SE selaku Kepala UPTD Kecamatan Lalabata yaitu:” Terkait dengan pengawasan DPPKAD berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi kegiatan pertambangan meski besaran pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.⁵¹

Bapak Muhtar S.SOS selaku Kordinator pajak mineral bukan logam dan batuan menyatakan bahwa:

”Pengawasan dilakukan dengan mendatangi wajib pajak pada awal bulan untuk menyerahkan SKAP, pertengahan bulan didatangi lagi untuk memantau pengisian SKAP, selanjutnya akhir bulan melakukan penagihan SKAP (wawancara pada hari Jumat, 24 Juni 2016)”.⁵²

Hal lain juga dijelaskan oleh Bapak Asmi selaku kordinator pajak mineral bukan logam dan batuan Kecamatan Ganra yaitu:

”Di Ganra kegiatan pertambangan itu tidak beroperasi setiap bulannya karena material yang ada di Ganra hanya berupa pasir yang pertambangannya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, jadi

⁴⁹ Indri Purnama Sari S.STP, *loc. cit.*

⁵⁰ Drs. Nur Alam, *loc. cit.*

⁵¹ Lukman SE, *loc. cit.*

⁵² Muhtar S.SOS, *loc. cit.*

pengawasannya hanya kami lakukan apabila ada kegiatan pertambangan (wawancara pada hari Jumat, 24 Juni 2016)".⁵³

Wawancara yang dilakukan dengan H.Arsa selaku wajib pajak

Kecamatan Lalabata menjelaskan:

"Setiap akan melakukan kegiatan pertambangan dilaporkan ke DPPKAD untuk melakukan pengisian SKAP, selanjutnya ada petugas dari DPPKAD melakukan pantauan terhadap kegiatan pertambangan serta pengisian SKAP (wawancara pada hari Sabtu, 25 Juni 2016)".⁵⁴

Bapak Samsu Rijal juga berpendapat:" Saya membayar pajak apabila bahan galian dimuat keluar dan dihitung per truk, pada saat itulah petugas dari DPPKAD datang untuk melakukan pemantauan (wawancara pada hari Sabu, 25 Juni 2016)".⁵⁵

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menggunakan Sistem *Self Assessmen* dimana wajib pajak yang menentukan sendiri besaran pajak yang akan dibayarkan, kemudian kordinator pajak mendatangi wajib pajak untuk memantau pengisian Surat Keterangan Asal Produksi (SKAP). Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan pengisian SKAP yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pemasukan daerah. Pada realita saat ini petugas yang memantau kegiatan pertambangan terbatas oleh sumber daya manusia, dimana seharusnya ada petugas yang melekat di lokasi tambangan untuk memantau setiap adanya kegiatan pertambangan.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh

⁵³ Asmi, *loc. cit.*

⁵⁴ Wawancara dengan H.Arsa, tanggal 25 Juni 2015

⁵⁵ Wawancara dengan Samsu Rijal, tanggal 25 Juni 2016

DPPKAD belum maksimal, karena pemantauan terhadap wajib pajak hanya dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan. Ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24 dan 25 Juni 2016.

b. Pemberian sanksi

Pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran sangat diperlukan agar terwujudnya kepatuhan atau kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di DPPKAD Kabupaten Soppeng pemberian sanksi belum terlalu efektif karena masih banyaknya wajib pajak yang pembayaran pajaknya masih menunggak.

Hal ini diperjelas oleh Ibu Indri Purnama Sari yaitu:

”Sanksi belum terlalu diterapkan, apabila ternyata ada wajib pajak yang pembayaran pajaknya menunggak maka pajaknya akan menjadi piutang dan akan ditagih pada tahun berikutnya dan sanksinya hanya berupa teguran (wawancara pada Kamis, 23 Juni 2016)”.⁵⁶

Bapak Nur Alam berpendapat bahwa:” Sanksi hanya berupa teguran bagi yang menunggak dan penertiban bagi yang tidak berizin (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.⁵⁷

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Lukman SE yaitu:

”Terkait dengan sanksi ada berupa teguran, meski diberi teguran tetap masih banyak wajib pajak yang pembayarannya menunggak sampai bertahun-tahun, dan apabila ditemukan tambang yang tidak berizin maka akan ditertibkan langsung oleh PSDA yang bekerja sama dengan Satpol PP (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.⁵⁸

Bapak H.Arsa menjelaskan bahwa:” Mengenai sanksi diberikan teguran oleh petugas DPPKAD apabila pembayaran pajak menunggak (wawancara

⁵⁶ Indri Purnama Sari S.STP, *loc. cit.*

⁵⁷ Drs. Nur Alam, *loc. cit.*

⁵⁸ Lukman, SE, *loc. cit.*

pada hari Sabtu, 25 Juni 2016)”.⁵⁹ Namun hal yang lain dijelaskan oleh Bapak Samsu Rijal yaitu:” Mengenai Sanksi, hal yang seperti itu belum pernah didapatkan karena pembayaran pajak selalu dilakukan tepat waktu (wawancara pada hari Sabtu, 25 Juni 2016)”.⁶⁰

Pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran berupa teguran dan penertiban lokasi tambang, meski adanya pemberian teguran tetap saja masih banyak wajib pajak yang pembayarannya menunggak sampai bertahun-tahun, namun untuk lokasi yang tidak berizin DPPKAD sudah bertindak tegas terhadap penambang dengan menertibkan lokasi pertambangan.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan terhadap pemberian sanksi dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi kepada wajib pajak beluk cukup maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pembayaran pajak yang menunggak sampai bertahun-tahun sehingga mempengaruhi pemasukan daerah. Ini sesuai dengan hasil observasi pada hari Kamis dan Sabtu, 23 dan 25 Juni 2016.

C. PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Suatu perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pada dasarnya perencanaan merupakan fungsi pokok dari manajemen, dan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa adanya perencanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain tidak dapat

⁵⁹ H. Arsa, *loc. cit.*

⁶⁰ Samsu Rijal, *loc. cit.*

dijalankan. Dengan kata lain tanpa adanya perencanaan maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan.

Perencanaan dalam penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan di DPPKAD Kabupaten Soppeng dilakukan dengan bekerjasama antara dinas-dinas terkait seperti Lingkungan Hidup, KPT, PSDA dan ESDM serta mengacu pada realisasi, penambahann atau pengurangan objek pajak serta besarnya potensi penambang sehingga sangat berpengaruh untuk penentuan target pada tahun selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dari penentuan target tahun selanjutnya dengan berdasar pada realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSEN
1.	2010	Rp. 310.542.000	Rp. 246.264.522	79,22%
2.	2011	Rp. 310.424.061	Rp. 236.618.520	76,22%
3.	2012	Rp. 246.264.522	Rp. 8.686.000	3,52%
4.	2013	Rp. 40.000.000	Rp. 35.601.125	23,34%
5.	2014	Rp. 150.000.000	Rp. 84.078.500	56,05%
6.	2015	Rp. 150.000.000	Rp. 146.878.425	97,91%

Sumber: Kantor Bidang PAD DPPKAD Kabupaten Soppeng, tahun 2016

Berdasarkan data di atas realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun mengalami penurunan serta tidak pernah mencapai target dikarenakan kurangnya kesadaran membayar pajak serta seringnya pengusaha tambang tidak beroperasi, hal tersebut menjadi dasar DPPKAD sangat memperhatikan tingkat realisasi tahun sebelumnya dalam menetapkan target untuk tahun selanjutnya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan upaya untuk menjadikan

perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab.⁶¹

Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Soppeng terdiri dari pembagian tugas serta proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Pada tahap pembagian tugas bertujuan untuk pengarahan dan pengembangan tenaga kerja. Proses pemungutan pajak bertujuan untuk mengetahui besaran pajak yang masuk ke kas daerah.

Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Soppeng dilihat dari pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator tiap Kecamatan yang mengurus berbagai jenis pajak bukan hanya pajak mineral bukan logam dan batuan.

Adapun dari segi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu adanya perubahan peraturan yang terjadi pada tahun 2012 menyebabkan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Hal ini berdasarkan realisasi PAD pada tahun 2010-2015.

⁶¹Hanifah."Fungsi-fungsi Manajemen, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Evaluasi"[http://www.academia.edu/9851358/isi_makalah_FUNSI-FUNGSI MANAJEMEN PERENCANAAN PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI](http://www.academia.edu/9851358/isi_makalah_FUNSI-FUNGSI_MANAJEMEN_PERENCANAAN_PENGORGANISASIAN_PELAKSANAAN_DAN_EVALUASI), diakses 20Juli 2016.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	PAD Keseluruhan Kabupaten Soppeng	Kontribusi
1.	2010	Rp. 246.264.522	Rp. 16.531.437.645,61	1,48%
2.	2011	Rp. 236.618.520	Rp. 21.551.766.287,81	1,09%
3.	2012	Rp. 8.686.000	Rp. 25.894.588.261,47	0,03%
4.	2013	Rp. 35.601.125	Rp. 40.096.283.908,94	0,08%
5.	2014	Rp. 84.078.500	Rp. 60.544.221.463,67	0,001%
6.	2015	Rp. 146.878.425	Rp. 105.937.493.447,55	0,13%

Sumber: Kantor Bidang PAD DPPKAD Kabupaten Soppeng, tahun 2016

Data di atas menunjukkan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah masih sangat rendah yakni tidak mencapai 2% dan pada tahun 2014 sangat rendah yaitu hanya 0,001 % hal ini dikarenakan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun mengalami penurunan, namun target pendapatan asli daerah tiap tahun meningkat, serta belum terkelolanya pajak mineral bukan logam dan batuan secara maksimal.

3. Pengawasan

Mappaenre menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, mencocokkan serta membandingkan antara pelaksanaan kerja dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga mempermudah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan.⁶²

Pengawasan terhadap pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sangat penting untuk menghindari kegiatan penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam memenuhi target pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng.

Siagian mengemukakan bahwa Pengawasan tidak akan berjalan dengan

⁶² Mappaenre. *op. cit*, hal. 104.

baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja.⁶³ Karena itu pengawasan di DPPKAD Kabupaten Soppeng menggabungkan antara pengawasan tidak langsung dengan pengawasan langsung, dimana petugas DPPKAD secara langsung datang ke lokasi tambang untuk melakukan pemantauan tiap bulannya. Hal ini belum maksimal, karena pemantauan terhadap wajib pajak hanya dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan.

Dalam pengawasan pemberian sanksi juga sangat penting untuk dilakukan karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak. Namun pemberian sanksi yang diberikan oleh DPPKAD kepada wajib pajak belum cukup maksimal karena sanksi yang diberikan hanya berupa teguran sehingga mengakibatkan penunggakan pajak sampai bertahun-tahun.

⁶³ Siagian. *op. cit*, hal. 116.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Perencanaan dalam penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun masih kurang maksimal dikarenakan jumlah pajak yang masuk sulit untuk diprediksi, meski adanya dasar yang digunakan sebagai penentuan target pajak namun realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun mengalami penurunan sehingga target tiap tahun tidak pernah ditingkatkan.
2. Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dilihat dari pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pengawas yaitu hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator pajak tiap Kecamatan, dari segi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu adanya perubahan peraturan yang terjadi pada tahun 2012 menyebabkan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan.
3. Pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh DPPKAD belum maksimal, kurangnya pengawasan lapangan disebabkan tenaga sumber daya manusia masih kurang pemantauan terhadap wajib pajak hanya dilakukan serta sanksi yang diberikan masih lemah yaitu hanya berupa

teguran sehingga mengakibatkan penunggakan pajak sampai bertahun-tahun.

B. Implikasi

Hasil penelitian mengenai pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng merupakan bukti ilmiah akan pentingnya pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan karena hasil dari pertambangan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. Saran

1. Dengan melihat hasil penelitian di atas, pengelolaan dalam perencanaan penetapan target masih kurang maksimal, dan hal ini perlu untuk diperhatikan lagi.
2. Agar kiranya sumber daya manusia di DPPKAD lebih ditingkatkan lagi khususnya kordinator yang bertanggung jawab menangani tiap jenis pajak.
3. Agar kiranya DPPKAD tetap memperhatikan pemungutan pajak meski adanya perubahan peraturan daerah.
4. Agar kiranya DPPKAD terus melakukan pengawasan yang maksimal sehingga tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, serta lebih memperhatikan lagi pemberian sanksi agar tidak ada lagi penunggakan pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Faried dan Baharuddin. 2014. *Ilmu Administrasi dan Pendekatan Hakikat Inti*. Bandung: Refika Aditama
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Fuad Anis dan Kandung Spto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manullang, M. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen (Cetakan Ke-21)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mappaenre, Ahmad. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- . 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sujarweni, Wiratna V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

B. Jurnal Ilmiah

- Rahmawati, Indah. 2014. *Analisi Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gresik*. Jurnal tidak diterbitkan. Gresik: Universitas Brawijaya Malang

C. Skripsi

- Valia, Egy. 2011. *Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian Golongan C dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan*. Skripsi tidak diterbitkan. Padang: Universitas Andalas

D. Sumber Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

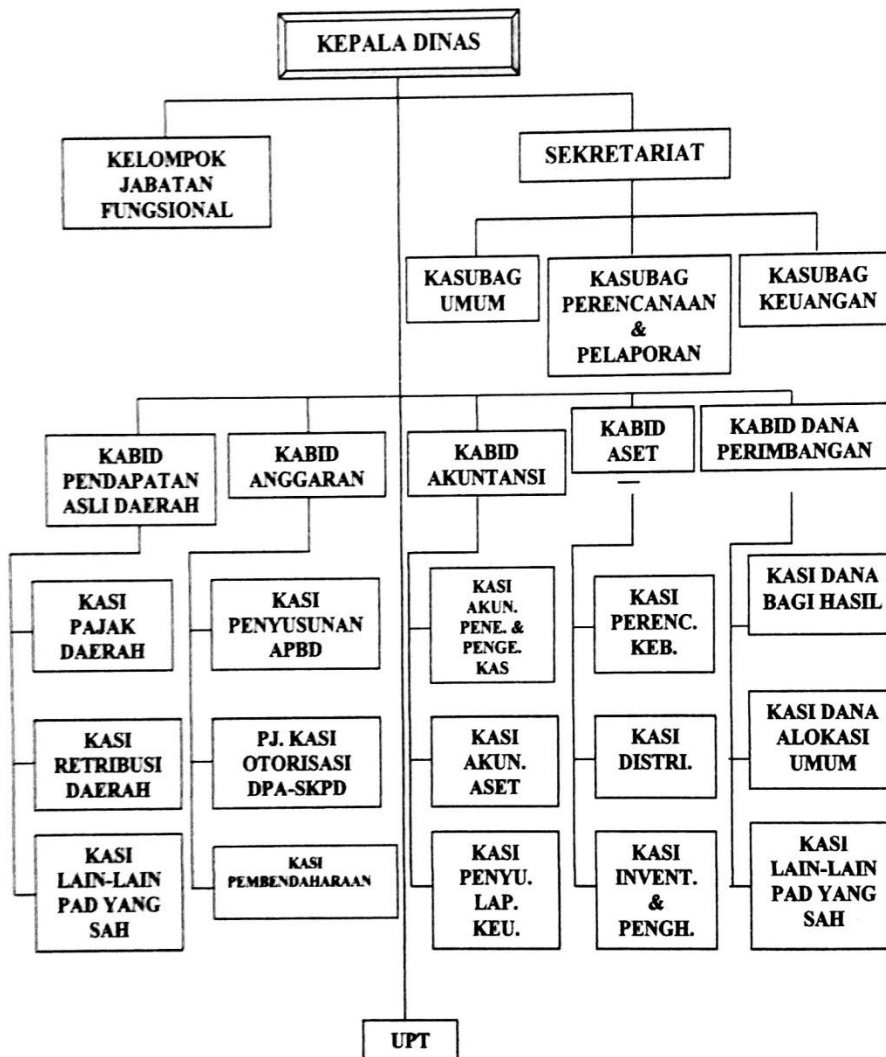
E. Sumber lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengelolaan*. (Online)
(<http://kbbi.web.id/pengelolaan>, diakses 29 Desember 2015)

Hanifah."Fungsi-fungsi Manajemen, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Evaluasi"
(http://www.academia.edu/9851358/isi_makalah_FUNSI-FUNGSI_MANAJEMEN_PERENCANAAN_PENGORGANISASIAN_PELAKSANAAN_DAN_EVALUASI, diakses 20 Juli 2016)

LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(DPPKAD) KABUPATEN SOPPENG**



Gambar 2 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Soppeng

Lampiran 1

**MATRIKS PENELITIAN PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

Judul	Rumusan Masalah	Fokus	Sub Fokus	Sumber Data	Metode Penelitian
Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perencanaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng? 2. Bagaimana pelaksanaan pajak mineral mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng? 3. Bagaimana pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng? 	Pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer berasal dari informan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kabid PAD b. Kasi Pajak Daerah c. Kepala UPTD d. Kordinator Pajak e. Wajib Pajak 2. Data Sekunder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian adalah penelitian deskriptif dengan disain penelitian kualitatif 2. Pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

**PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

1. Perencanaan

- a. Bagaimana cara perumusan strategi untuk menentukan besarnya target yang ingin dicapai DPPKAD setiap tahun?
- b. Apa saja yang menjadi dasar DPPKAD dalam penentuan target tiap tahun?

2. Pelaksanaan

- a. Bagaimana pembagian kerja dari pegawai DPPKAD Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan?
- b. Bagaimana pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan?

3. Pengawasan

- a. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan pajak?
- b. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran?

Lampiran 3

**MATRIKS PEDOMAN WAWANCARA MENGENAI PENGELOLAAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
SOPPENG**

Fokus	Sub fokus	Pertanyaan	Informan
Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1. Perencanaan	<p>a. Bagaimana cara perumusan strategi untuk menentukan besarnya target yang ingin dicapai DPPKAD setiap tahun?</p> <p>b. Apa saja yang menjadi dasar DPPKAD dalam penentuan target tiap tahun?</p>	<p>Indri Purnama Sari</p> <p>Nur Alam</p>
	2. Pelaksanaan	<p>a. Bagaimana pembagian kerja dari pegawai DPPKAD Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan?</p> <p>b. Bagaimana pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan?</p>	<p>Indri Purnama Sari</p> <p>Nur Alam</p> <p>Lukman</p> <p>Muhtar</p> <p>Asmi</p>

	3. Pengawasan	<p>a. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan pajak?</p> <p>b. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran?</p>	<p>Indri Purnama Sari Nur Alam Lukman Muhtar Asmi H. Arsa A. Samsu Rijal</p>
--	----------------------	--	--

Lampiran 4

DAFTAR NAMA INFORMAN

Informan Pertama

Nama : Indri Purnama Sari S.STP

Pekerjaan : Kepala Bidang PAD

Informan Kedua

Nama : Drs. Nur Alam

Pekerjaan : Kepala Seksi Pajak Daerah

Informan Ketiga

Nama : Lukman SE

Pekerjaan : Kepala UPTD Kecamatan Lalabata

Informan Keempat

Nama : Muhtar S.SOS

Pekerjaan : Kordinatot Pajak Kecamatan Lalabata

Informan Kelima

Nama : Asmi

Pekerjaan : Kordinator Pajak Kecamatan Ganra

Informan Keenam

Nama : H. Arsa

Pekerjaan : Wajib Pajak Kecamatan Lalabata

Informan ketujuh

Nama : A. Samsu Rijal

Pekerjaan : Wajib Pajak Kecamatan Ganra

Lampiran 5

MATRIKS DATA HASIL WAWANCARA
PENGELOLAAN PAJAK MENERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SOPPENG

No	Pertanyaan	Informan	Hasil wawancara	Reduksi Data	Penyajian data	Kesimpulan
1.	a. Bagaimana cara perumusan strategi untuk menentukan besarnya target yang ingin dicapai DPPKAD setiap tahun?	Indri Purnama Sari	Terkait perencanaan DPPKAD mengadakan pertemuan dengan dinas-dinas terkait untuk menentukan target tahun berikutnya dan besarnya penentuan target masih berdasarkan dari realisasi tahun sebelumnya, apabila besaran pajak yang masuk mencapai target maka tahun berikutnya akan dinaikkan begitupun sebaliknya karena realisasi mempengaruhi pendapatan Kabupaten	Perencanaan dalam penentuan target tiap tahun dilakukan dengan cara melihat realisasi tahun sebelumnya untuk menentukan target tahun berikutnya.	Perencanaan sangat berpengaruh terhadap strategi untuk menentukan besarnya target yang ingin dicapai DPPKAD Kabupaten Soppeng yaitu mengacu pada besaran pajak yang masuk dari tahun sebelumnya sehingga sangat berpengaruh untuk penentuan target pada tahun selanjutnya	Perencanaan dalam penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun masih kurang baik dikarenakan jumlah pajak yang masuk sulit untuk diprediksi, meski adanya dasar yang digunakan sebagai penentuan target pajak namun realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun mengalami
		Nur Alam	Penetapan target sangat dipengaruhi oleh perencanaan karena besarnya pajak sulit untuk diprediksi, sehingga penetapan target tahun berikutnya dilihat dari tahun			

			sebelumnya			
	b. Apa saja yang menjadi dasar DPPKAD dalam penentuan target tiap tahun?	Nur Alam	Dasar penentuan target tiap pajak daerah meliputi realisasi, penambahan atau pengurangan wajib pajak serta besarnya potensi penambang	Dasar dalam penentuan target tiap tahun dapat dilihat dari realisasi tahun sebelumnya, penambahan atau pengurangan wajib pajak serta besarnya potensi penambang.	Dasar-dasar yang digunakan dalam penentuan target pajak daerah tiap tahunnya dapat disimpulkan bahwa realisasi, penambahan atau pengurangan wajib pajak serta besarnya potensi penambang mempunyai peran yang sangat penting sebagai dasar dari penentuan target pajak untuk tahun berikutnya	penurunan sehingga target tiap tahun tidak pernah ditingkatkan.
		Indri Purnama Sari	Dasar penentuan target dilihat dari realisasi tahun sebelumnya apabila target tidak tercapai maka target akan diturunkan 10% begitupun sebaliknya. Apabila wajib pajak bertambah maka akan dilakukan penambahan dalam hal penentuan target, begitupun sebaliknya apabila wajib pajak berkurang maka akan dilakukan penurunan dalam penentuan target. Potensi dapat dilihat dari banyaknya objek hasil bumi yang diperoleh apabila hasil bumi yang diperoleh berlimpah maka target akan dinaikkan, kondisi alam juga sangat berpengaruh terhadap jumlah tambang yang diperoleh			

2.	a. Bagaimana pembagian kerja dari pegawai DPPKAD Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan?	Indri Purnama Sari	Pembagian kerja di DPPKAD dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan ada yang disebut dengan UPTD yang bertugas menunjuk kordinator yang menangani berbagai jenis pajak termasuk pajak mineral bukan logam dan batuan.	Pembagian kerja di DPPKAD dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan ada yang disebut dengan UPTD di setiap Kecamatan dan disitulah ada yang bertugas sebagai kordinator pajak.	Pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator tiap Kecamatan yang mengurus berbagai jenis pajak bukan hanya pajak mineral bukan logam dan batuan	Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dilihat dari pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pengawas yaitu hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator pajak tiap Kecamatan, dari segi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu adanya perubahan peraturan yang terjadi pada tahun 2012 menyebabkan kontribusi pajak mineral bukan
		Nur Alam	Setiap Kecamatan memiliki UPTD dan kordinator yang menangani pajak			
		Lukman	Di UPTD ada yang bertanggung jawab sebagai kordinator penagih pajak kepada penambang			
		Muhtar	Sebagai kordinator saya bertanggung jawab terhadap penagihan serta pengawasan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan			
		Asmi	Sebagai koordinator pajak Kecamatan Ganra saya bertanggung jawab penuh terhadap berbagai jenis pajak termasuk pajak mineral bukan logam dan batuan			

b.	Bagaimana pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan?	Indri Purnama Sari	Sistem Pemungutan pajak dilakukang dengan menggunakan Self Assessment yaitu wajib pajak sendiri yang melakukan pengisian SKAP kemudian menyetorkannya ke kas daerah, sebelum Perda yang baru diterbitkan yang menjadi wajib pajak Pengguna dari mineral bukan logam tersebut bukan penambang hal ini sangat berpengaruh terhadap pemasukan daerah	Sistem pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan Self Assessment. Proses pemungutannya dilakukan dengan cara penagihan SKAP, penyetoran dan selanjutnya pelaporan.	Proses pemungutan pajak dapat disimpulkan bahwa perubahan peraturan sangat berpengaruh terhadap kontribusi pajak yang masuk ke kas daerah.	logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan.
		Lukman	Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem Self Assessment dimana penentuan pajak ditentukan oleh penambang sendiri yang diberikan kewenangan penuh kepada penambang untuk menentukan besaran pajak yang dibayarkan kepada Pemda			
		Nur Alam	Proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan			

			batuan dilakukan dengan cara melakukan penagihan, penyetoran kemudian pelaporan			
		Muhtar	Penagihan SKAP pada wajib pajak dilakukan pada saat akhir bulan, selanjutnya besaran pajak dihitung, setelah itu wajib pajak melakukan pembayaran dan slip setoran dibawa ke bendahara.			
		Asmi	Sebagai kordinator yang bertugas sebagai penagih pajak, penagihan SKAP dilakukan pada akhir bulan			
3.	a. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan pajak?	Indri Purnama Sari	Pengawasan dilakukan dengan pemantauan langsung oleh kordinator pajak yang bertugas untuk mendatangi wajib pajak apabila melakukan operasi pertambangan.	Pengawasan oleh kordinator pajak dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan yaitu dengan memantau pengisian SKAP oleh wajib pajak.	pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD belum maksimal, karena pemantauan terhadap wajib pajak hanya dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan.	Pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh DPPKAD belum maksimal, kurangnya pengawasan lapangan disebabkan tenaga sumber daya manusia masih kurang pemantauan terhadap wajib
		Nur Alam	Pengawasan hanya dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan.			
		Lukman	Terkait dengan pengawasan DPPKAD berusaha			

			semaksimal mungkin untuk mengawasi kegiatan pertambangan meski besaran pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak.			pajak hanya dilakukan serta sanksi yang diberikan masih lemah yaitu hanya berupa teguran sehingga mengakibatkan penunggakan pajak sampai bertahun-tahun.
		Muhtar	Pengawasan dilakukan dengan mendatangi wajib pajak pada awal bulan untuk menyerahkan SKAP, pertengahan bulan didatangi lagi untuk memantau pengisian SKAP, selanjutnya akhir bulan melakukan penagihan SKAP.			
		Asmi	Di Ganra kegiatan pertambangan itu tidak beroperasi setiap bulannya karena material yang ada di Ganra hanya berupa pasir yang pertambangannya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, jadi pengawasannya hanya dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan.			
		H. Arsa	Setiap akan melakukan kegiatan pertambangan kami melaporkan ke DPPKAD untuk melakukan pengisian			

			SKAP, selanjutnya ada petugas dari DPPKAD melakukan pantauan terhadap kegiatan pertambangan serta pengisian SKAP.			
		A. Samsu Rijal	Pajak dibayar apabila bahan galian dimuat keluar dan dihitung per truk, pada saat itulah petugas dari DPPKAD datang untuk melakukan pemantauan.			
b. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran ?	Indri Purnama Sari	Sanksi belum terlalu diterapkan, apabila ternyata ada wajib pajak yang pembayaran pajaknya menunggak maka pajaknya akan menjadi piutang dan akan ditagih pada tahun berikutnya dan sanksinya hanya berupa teguran.	Pemberian sanksi berupa teguran terhadap wajib pajak yang pembyaran pajaknya menunggak dan penertiban bagi penambang yang tidak berizin.	Pemberian sanksi kepada wajib pajak beluk cukup maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pembayaran pajak yang menunggak sampai bertahun-tahun sehingga mempengaruhi pemasukan daerah		
	Nur Alam	Sanksi berupa teguran bagi yang menunggak dan penertiban bagi yang tidak berizin.				
	Lukman	Terkait dengan sanksi ada berupa teguran, meski diberi teguran tetap masih banyak wajib pajak yang				

			pembayarannya menunggak, sampai bertahun-tahun, dan apabila ditemukan tambang yang tidak berizin maka akan ditertibkan langsung oleh PSDA yang bekerja sama dengan Satpol PP.			
		H. Arsa	Mengenai sanksi diberikan teguran oleh petugas DPPKAD apabila pembayaran pajak menunggak.			
		A. Samsu Rijal	Mengenai Sanksi, hal yang seperti itu belum pernah didapatkan karena pembayaran pajak selalu dilakukan tepat waktu.			

Lampiran 6



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Alamat: Jl. AP. Pettarani Makassar Telp. 885105 fax 885105
Website : <http://ian.unm.ac.id>

USUL PROPOSAL PENELITIAN/PENULISAN SKRIPSI

A. IDENTITAS

1. Nama : Nini Andriani
2. Tempat/Tgl Lahir : Leworeng, 13 Juli 1994
3. Nomor Induk Mahasiswa : 1265140007
4. Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
5. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

B. FOKUS PENELITIAN

- ☐ Kebijakan Publik
- ☐ Pelayanan Publik
- ☐ Administrasi Pembangunan

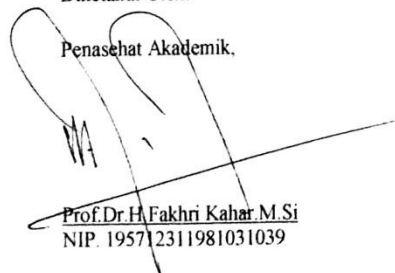
C. JUDUL SKRIPSI YANG DIUSULKAN

1. Pengelolaan Pajak Mineral bukan logam dan Batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng
2. Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng
3. Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng

Makassar, Desember 2015

Diketahui Oleh:

Penasehat Akademik,


Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si
NIP. 195712311981031039

Mahasiswa yang bersangkutan



Nini a Andriani
NIM. 1265140007

P₂ = Dr. Mah. Nur Yamin, M.Si

Lampiran 7



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Alamat: Jl. AP. Pettarani Makassar Telp. 885105 fax 885105
Website : <http://ian.unm.ac.id>

PERSETUJUAN JUDUL DAN CALON PEMBIMBING

A. IDENTITAS

1. Nama : Nini Andriani
2. Tempat/Tgl Lahir : Leworeng, 13 Juli 1994
3. Nomor Induk Mahasiswa : 1265140007
4. Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
5. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

B. JUDUK SKRIPSI YANG DISETUJUI

Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan
Pendapatan asli Daerah Kabupaten Soppeng

C. PEMBIMBING YANG DITUNJUK

No.	Nama Pembimbing/NIP	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si NIP. 1957 12811981031039	1.
2	Dr. Muh. Nur Tamin, M.Si NIP. 196701311992031001	2.

Makassar, 8 Januari 2016

Ketua Program Studi
Ilmu Adm. Negara FIS UNM

Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si
NIP. 19601231 198803 1 001

Lampiran 8



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan : A.P. Pettarani Makassar

Laman : EIS_UNM@unm.ac.id

Nomor : 2846/UN36.6/DL/2016

10 Juni 2016

Lamp. : -

Hal : Pengesahan Judul Skripsi
dan Pembimbing

Yth. : Sdr. **Nini Andriani**
di Makassar

Stambuk : 1265140007

Berdasarkan surat permohonan Saudara tertanggal 10 Juni 2016 perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat ini, maka dengan ini disampaikan dengan hormat kepada Saudara bahwa rencana skripsi berjudul:

Pengeioiaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si.
2. Dr. Muh. Nur Yamin, M.Si.

Dapat disetujui dan dinyatakan SAH.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dipergunakan seperlunya.


an. **Dekan**
Pembantu Dekan Bidang Akademik,
Dr. Firman Umar, M.Hum.
NIP 196108121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Adm. Negara

Lampiran 9



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jalan : A.P. Pettarani Makassar
Laman : FIS_UNM@unm.ac.id

Nomor : 2847/UN36.6/PI/2016

10 Juni 2016

Lamp. : -

Hal : Permintaan Izin Melaksanakan
Penelitian

Yth. : **GOVERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

Dimohon dengan hormat kiranya kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini, dapat diberikan izin mengadakan penelitian di: **Kabupaten Soppeng** dalam rangka penulisan skripsi.

Nama : **Nini Andriani**

Stambuk : 1265140007

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si.

2. Dr. Muh. Nur Yamin, M.Si.

Masalah yang diteliti :

Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

an. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik.

Dr. Firman Umar, M.Hum.
NIP.196108121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Adm. Negara

Lampiran 10



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 8009/S.01.P/P2T/06/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Soppeng

di-
Tempat

Berdasarkan surat Pembantu Dekan Bid. Akademik FIS UNM Makassar Nomor : 2847/UN36.6/PI/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NINI ANDRIANI**
Nomor Pokok : 1265140007
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. AP. Pettarani, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SOPPENG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 Juni s/d 16 Agustus 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 15 Juni 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A.M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth.
1. Pembantu Dekan Bid. Akademik FIS UNM Makassar;
2. Pertinggal.


SIMAP BKPM 16-06-2016



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpm.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222



Lampiran 11

		SRN CO0001899
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG KANTOR PELAYANAN TERPADU <small>Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812</small>		
IZIN PENELITIAN		
Nomor : 232/IP/KPT/VI/2016		
DASAR	1. Surat Permohonan NINI ANDRIANI 2. Rekomendasi dari BAPPEDA Nomor 232/IP/REK-T.TEKNIS/BAPPEDA/VI/2016	Tanggal 20-06-2016 Tanggal 09-06-2016
MENGIZINKAN		
KEPADA		
NAMA	: NINI ANDRIANI	
UNIVERSITAS/	: UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	
LEMBAGA		
Jurusan	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA	
ALAMAT	: KAMPONG GODANG/LEWORENG	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Soppeng dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SOPPENG	
LOKASI PENELITIAN	: DPPKAD KAB. SOPPENG	
JENIS PENELITIAN	: DESKRIPTIF KUALITATIF	
LAMA PENELITIAN	: 16 Juni 2016 s.d 16 Agustus 2016	
a.	Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
Ditetapkan di : Watansoppeng Pada Tanggal : 20-06-2016		
		
Drs. A. MAKKARAKA, M. Si Pangkat : PEMBINA TK. I NIP : 19690615 199703 1 010		
Biaya : Rp. 0,00		



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JALAN SALOTUNGO NO. 3 TELEPON (0484) 21066
WATANSOPPENG - 90812

SURAT KETERANGAN
No. 48/PAD/DPPKAD/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NINI ANDRIANI

Alamat : Kampong Godang / Leworeng

Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

Benar telah melakukan penelitian terkait pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Bidang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Soppeng, yang dilaksanakan pada bulan Juni – Agustus 2016.

Demikian keterangan ini kami buat dan berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 18 Agustus 2016

An. Kepala Dinas PPKAD
Kepala Bidang PAD

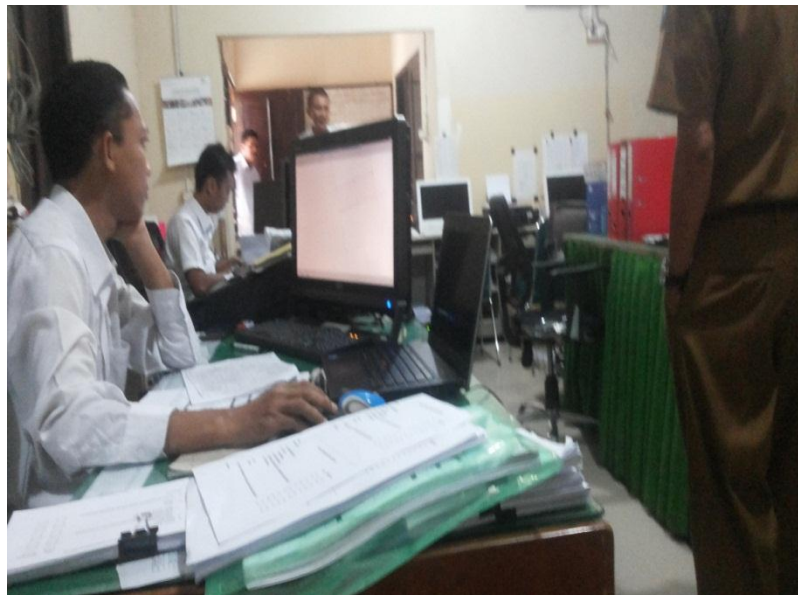


INDRIYANAMASARI, S.STP
NIP. 19830922 200112 2 001

DOKUMENTASI



Kantor Bidang PAD



Proses pengolahan data pajak di Kantor PAD



Proses penghitungan pajak di Kantor UPTD Lalabata



Salah satu lokasi pertambangan



Salah satu lokasi pertambangan

PROSES WAWANCARA DENGAN INFORMAN



Wawancara dengan Kepala Seksi Pajak Daerah mengenai Perencanaan Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.



Wawancara dengan Kepala UPTD Lalabata dan Kordinator Pajak mengenai pengawasan terhadap pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan.



Wawancara dengan Kepala Kantor PAD mengenai pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan.



Wawancara dengan wajib pajak mengenai sanksi terhadap pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

FORM YANG HARUS DIISI DALAM PROSES PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

1. Surat Keterangan Asal Produksi (SKAP)

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

No. : **0015651**

SURAT KETERANGAN ASAL PRODUKSI
TAMBANG GALIAN GOLONGAN "C"
PERDA NO. 3 TAHUN 2012

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor SIPD :
3. Jenis Bahan : Pasir/ Kerikil / Batu Kali
Batu pecah / Timbunan
SIRTU / *

1. Volume Bahan :
2. Jenis Kendaraan :
3. Nomor kendaraan :
Watansoppeng

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
) Cap / Tanda tangan Nama () (

Lembar I. Pos Pemeriksaan (Putih)
II. Konsumen (Kuning)
III. BKDH / DPPKAD (Hijau)
IV. Arsip (Merah)

2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

No. : **0015651**

SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK PENGAMBILAN
DAN PENGALAMAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN "C"
PERDA NO. 3 TAHUN 2012

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor SIPD :
3. Jenis Bahan : Pasir/ Kerikil / Batu Kali
Batu pecah / Timbunan
SIRTU / *

1. Volume Bahan :
2. Jenis Kendaraan :
3. Nomor kendaraan :
Watansoppeng

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
) Cap / Tanda tangan Nama () (

Lembar I. Pos Pemeriksaan (Putih)
II. Konsumen (Kuning)
III. BKDH / DPPKAD (Hijau)
IV. Arsip (Merah)

5. Contoh Slip Setoran

Kredit Sahabat		SLIP SETORAN		PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULSEL BAK	
Kode		Tgl		Checker *Dik. Oleh Bank	
Setoran Untuk:		Tanggal Setoran/Pembukaan *Dik. Oleh Bank		Tgl	
<input type="checkbox"/> Simpanan <input type="checkbox"/> Tabungan <input type="checkbox"/> Deposito <input type="checkbox"/> Lainnya		No Rekening: 1101-002-8682-9 Nama Pemilik Rekening: DEWI PEREMAN DPPKAD Kode Cab. Tujuan: 1101 - Cabang: SPPKAD			
No. Dokumen	Jumlah				
	Rp. 6.022.000				
Komis *Dik. oleh Bank	Rp. 5	Nama Penyeter: NURHAT S. SUI			
Biaya *Dik. oleh Bank	Rp. 5	No. Telp. Penyeter: 011-2222222			
TOTAL	Rp. 6.022.000	Alamat/No. Identitas: Jl. Nangkewan			
Terbilang: enam juta empat puluh dua ribu rupiah		Sumber Dana: gaji Tambang Galian Gergas			
		Berkas/Keterangan: Cunggakan			
Penyeter telah membaca dan setuju untuk tunduk pada ketentuan dan syarat umum yang tertera di balik slip ini					
Ttd. Penyeter	Ttd. Teller	Paga Approve			
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)			
Transaksi dianggap sah bila pada SLIP SETORAN ini terdapat catatan Komputer, Stempel dan Tanda Tangan Teller					

RIWAYAT HIDUP



Nini Andriani. Lahir di Leworeng pada tanggal 13 Juli 1994. Anak tunggal dari pasangan Bakri dan Hj. Norma Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2000 di SD Negeri 46 Tokare kemudian pindah ke SD Negeri 168 Kessing dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Muhammadiyah Leworeng dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Donri-Donri dan tamat pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa di Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada tahun 2012.